

Penguatan Sikap dan Mental Antikorupsi Bagi Pelajar: Upaya Memerangi Korupsi

**Khairudin*¹, Tri Lestira Putri Warganegara², Hendri Dunan³, Aminah⁴,
Luke Suciyati Amna⁵, Andala Rama Putra Barusman⁶, Nurdiawansyah⁷,
Yanuaris Yanu Dharmawan⁸**

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Bandar Lampung

*e-mail: khairudin@ubl.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sikap dan mental antikorupsi pelajar SMA/SMK sebagai generasi penerus bangsa dalam upaya membantu pemerintah memerangi korupsi di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan pada periode 20-27 Desember 2021 dengan melibatkan pihak Universitas Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan 7 (tujuh) sekolah SMA/SMK selaku mitra. Kegiatan ini meliputi edukasi melalui sosialisasi/sharing session secara langsung (offline) dan evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan ini telah menghasilkan hal-hal yang positif, yakni (1) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman siswa akan korupsi dan bahayanya bagi masa depan bangsa Indonesia, sehingga sikap dan mental para generasi penerus (pelajar SMA/SMK) dimasa datang menjadi jauh lebih baik/kuat dan dampak positif ini diharapkan dapat memerangi korupsi di Indonesia pada masa datang; (2) meningkatnya kontribusi perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa pada pembangunan masyarakat; (3) meningkatkan kegiatan perekonomian; dan (4) meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum. Agar edukasi ini dapat berkesinambungan, maka pada masa datang mata pelajaran antikorupsi harus menjadi matapelajaran wajib di sekolah-sekolah dengan durasi yang cukup serta setiap semester diadakan pemilihan siswa yang “bersih korupsi” sebagai bentuk penghargaan dan keseriusan semua pihak untuk memerangi korupsi.

Kata kunci: Penguatan Sikap dan Mental, Antikorupsi, Pelajar

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyakit yang hingga saat ini masih menjadi persoalan bangsa di dunia yang harus diperangi, mengingat dampak yang ditimbulkan korupsi sangat luar biasa. Adapun dampak yang ditimbulkan korupsi diantaranya menghambat pengembangan organisasi [1], memperburuk kualitas pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi [2], menurunkan kepatuhan pada hukum [3], menurunkan kualitas manajemen [4], menghambat pertumbuhan dan kemakmuran rakyat [5], meningkatkan pemborosan pengeluaran pemerintah [6], menurunkan kualitas lingkungan [7], menurunkan kinerja ekonomi [8], [9] dan meningkatkan kemiskinan [10], [11].

Praktek korupsi di Indonesia sampai saat ini masih terus berlangsung. Menurut laporan *Transparency International*, nilai indeks persepsi korupsi Indonesia selama periode 2018-2020 berada pada kisaran 37 sampai dengan 40 dan berada di posisi jauh dibawah negara ASEAN lain, seperti: Singapore, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktek korupsi masih tinggi di Indonesia yang tentunya sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia [12]. Secara lengkap perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama 2018-2020 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Periode 2018-2020

Negara	2018		2019		2020	
	IPK	Peringkat	IPK	Peringkat	IPK	Peringkat
Indonesia	37	96	38	89	40	85
Singapura	84	6	85	3	85	4
Brunei Darussalam	62	32	63	31	60	35
Malaysia	47	62	47	61	53	51

Sumber: *Transparency International*, 2021

Salah satu upaya yang diyakini dapat menekan praktek korupsi adalah dengan memberikan edukasi sejak dini tentang bahaya korupsi kepada para pelajar sebagai generasi penerus bangsa [13]. Dengan edukasi sejak dini tentang bahaya korupsi kepada para pelajar, diharapkan generasi muda/pelajar memiliki sikap dan mental yang kuat lebih dini untuk tidak melakukan praktek korupsi (memerangi korupsi). Dengan sikap dan mental yang kuat lebih dini, maka diharapkan SDM yang dihasilkan sebagai calon pemimpin bangsa memiliki kompetensi dan juga integritas yang baik. Karena kompetensi dan juga integritas yang baik diyakini mampu menolak untuk berbuat korupsi.

2. METODE

Kegiatan PkM ini dilakukan pada pelajar SMA/SMK dengan melibatkan pihak Universitas Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan 7 SMA/SMK di Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan dengan (1) memberikan edukasi melalui sosialisasi/*sharing session*; dan (2) melakukan evaluasi. Kegiatan edukasi melalui sosialisasi/*sharing session* dilakukan secara langsung (*offline*) kepada para siswa SMA/SMK sesuai kesepakatan waktu dari masing-masing sekolah. Edukasi ini diberikan selama 3 jam yang terbagi dalam 2 sesi, yakni sesi pertama adalah penyajian materi oleh narasumber dan sesi kedua adalah diskusi/tanya-jawab. Narasumber pada kegiatan ini dosen FH Universitas Bandar Lampung yang berkompeten dibidang korupsi. Kegiatan evaluasi, meliputi evaluasi atas penyerapan materi oleh siswa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi penyerapan materi dilakukan dengan membandingkan nilai pre test dan nilai post test masing-masing siswa. Sedangkan evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah seluruh kegiatan edukasi untuk seluruh sekolah selesai, dimana setiap anggota tim diminta untuk memberikan penilaian atas keseluruhan kegiatan. Ini dimaksudkan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan ini dimasa datang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Edukasi melalui sosialisasi/*sharing session*

Kegiatan PkM tentang penguatan mental dan sikap antikorupsi bagi pelajar SMA/SMK di Bandar Lampung ini melibatkan 210 pelajar SMA/SMK dari 7 (tujuh) sekolah di Bandar Lampung yang dilakukan dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi/*sharing session* secara langsung (*offline*) kepada para siswa SMA/SMK sesuai kesepakatan waktu dari masing-masing sekolah.

Edukasi ini terbagi dalam 2 sesi, yakni sesi pertama adalah penyajian materi oleh narasumber dan sesi kedua adalah diskusi/tanya-jawab dengan total durasi pelaksanaan selama 3 (tiga) jam. Narasumber pada kegiatan ini adalah dosen FH Universitas Bandar Lampung yang berkompeten dibidang korupsi.

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan edukasi tentang penguatan sikap dan mental antikorupsi untuk 7 (tujuh) SMA/SMK di Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Waktu Pelaksanaan

No	Nama Sekolah	Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Peserta
1	SMA Taman Siswa Teluk Betung. Jl. W.R Supratman No. 74 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung	Senin, 20 Desember 2021 Jam 09.00-12.00 WIB	30 Siswa
2	SMK Arjuna Bandar Lampung Jl. Kapten Haji Ahmad Ibrahim No. 35 Enggal, Bandar Lampung	Selasa, 21 Desember 2021 Jam 09.00-12.00 WIB	30 Siswa
3	SMA Nusantara Bandar Lampung. Jl. Gelatik No.16, Tanjung Agung Raya-Kedamaian-Kota Bandar Lampung	Selasa, 21 Desember 2021 Jam 13.00-16.00 WIB	30 Siswa
4	SMA Xaverius Bandar Lampung. Jl. Cendana No. 31 Rawalaut-Enggal, Kota Bandar Lampung	Rabu, 22 Desember 2021 Jam 09.00-12.00 WIB	30 Siswa
5	SMA Negeri 15 Bandar Lampung Jl. Turi Raya, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung	Kamis, 22 Desember 2021 Jam 09.00-12.00 WIB	30 Siswa
6	SMA Islamiyah Bandar Lampung. Jl. Laksamana Malahayati No.50, Teluk Betung Selatan-Kota Bandar Lampung	Jum'at, 24 Desember 2021 Jam 08.30-11.30 WIB	30 Siswa
7	SMK Trisakti Jaya. Jl. Chairil Anwar No. 10 Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung	Senin, 27 Desember 2021 Jam 09.00-12.00 WIB	30 Siswa

Kegiatan edukasi melalui sosialisasi/*sharing session* ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran lebih dini para pelajar SMA/SMK [14] akan bahaya korupsi bagi perekonomian dan juga masa depan bangsa Indonesia, sehingga para pelajar SMA/SMK memiliki sikap dan mental yang jauh lebih baik untuk sadar akan bahaya korupsi. Dengan kesadaran lebih dini ini, diharapkan pada tahun-tahun mendatang SDM Indonesia akan menghasilkan calon-calon pemimpin yang bersih dan memiliki integritas yang kuat untuk menolak korupsi.



Gambar 1. Serangkaian kegiatan pelaksanaan

3.2 Evaluasi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan PkM ini dilakukan kegiatan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai *pre test* dan *post test* siswa. *Pre test* dan *post test* ini dilakukan dengan memberikan 5 pertanyaan untuk masing-masing siswa. Hal ini dilakukan untuk menilai daya serap siswa atas materi edukasi yang disampaikan narasumber. Berdasarkan hasil jawaban siswa yang mengikuti edukasi, dapat disimpulkan bahwa edukasi antikorupsi telah dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa akan korupsi dan bahayanya bagi masa depan bangsa Indonesia, sehingga sikap dan mental para generasi penerus (pelajar SMA/SMK) dimasa datang menjadi jauh lebih baik/kuat. Ini dapat dibuktikan dari tabel rekapitulasi nilai rata-rata *pre test* dan *post test* siswa.

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Mean Pree Test dan Post Test Siswa SMA/SMK Di Bandar Lampung

No	Nama Sekolah	Nilai Pree Test	Nilai Post Test	Kenaikan
1	SMA Taman Siswa Teluk Betung	50,22	60,88	10,66
2	SMK Arjuna Bandar Lampung	40,80	60,25	10,45
3	SMA Nusantara Bandar Lampung	40,78	60,12	10,34
4	SMA Xaverius Bandar Lampung	60,50	80,20	10,70
5	SMA Negeri 15 Bandar Lampung	60,25	70,90	10,65
6	SMA Islamiyah Bandar Lampung	40,72	60,10	10,38
7	SMK Trisakti Jaya	50,30	60,92	10,62

Sumber: Data Diolah, 2021

Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dengan melibatkan semua tim, setiap anggota tim diminta untuk memberikan penilaian atas keseluruhan kegiatan. Ini dimaksudkan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan ini dimasa datang. Berdasarkan penilaian tim, hal yang masih harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan adalah “koordinasi dan komunikasi” dimana masih ditemui beberapa kendala, seperti: keterlambatan acara, dan keterlambatan kelengkapan kegiatan yang disebabkan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi dalam sebuah kegiatan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi [15] dan meningkatkan efektifitas pelayanan [16].



Gambar 2. Kegiatan evaluasi

4. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi tentang penguatan mental dan sikap antikorupsi bagi pelajar SMA/SMK di Bandar Lampung ini dilakukan pada 20-27 Desember 2021 melibatkan 210 pelajar SMA/SMK dari 7 (tujuh) sekolah di Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Edukasi ini dilakukan melalui sosialisasi/*sharing session* secara langsung (*offline*) kepada para siswa SMA/SMK. Kolaborasi ini telah menghasilkan hal-hal yang positif, yakni (1) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman siswa akan korupsi dan bahayanya bagi masa depan bangsa Indonesia, sehingga sikap dan mental para generasi penerus (pelajar SMA/SMK) dimasa datang menjadi jauh lebih baik/kuat dan dampak positif ini diharapkan dapat memerangi korupsi di Indonesia pada masa datang; (2) meningkatnya kontribusi perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa pada pembangunan masyarakat; (3) meningkatkan kegiatan perekonomian; dan (4) meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum.

5. SARAN

Pada masa datang agar mata pelajaran antikorupsi menjadi matapelajaran wajib di sekolah-sekolah dengan durasi yang cukup serta setiap semester diadakan pemilihan siswa yang “bersih korupsi” sebagai bentuk penghargaan dan keseriusan semua pihak untuk memerangi korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberi dukungan financial terhadap kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Luo, “Corruption and Organization,” *Asia Pacific J. Manag.*, vol. 19, pp. 405–422, 2002, doi: 10.1023/A:1016252021370.

- [2] L. A. Pook, "Impact of Corruption on the Development of Information and Communications Infrastructures in Bulgaria and Romania," *J. East-West Bus.*, vol. 14, no. 1, pp. 101–113, Feb. 2008, doi: 10.1300/J097v14n01_05.
- [3] A. Sundström, "Corruption and Violations of Conservation Rules: A Survey Experiment with Resource Users," *World Dev.*, vol. 85, pp. 73–83, 2016, doi: 10.1016/j.worlddev.2016.04.011.
- [4] D. Athanasouli and A. Goujard, "Corruption and Management Practices: Firm Level Evidence," *J. Comp. Econ.*, vol. 43, no. 4, pp. 1014–1034, 2015, doi: 10.1016/j.jce.2015.03.002.
- [5] C. Sharma and A. Mitra, "Corruption, Governance and Firm Performance: Evidence from Indian enterprises," *J. Policy Model.*, vol. 37, no. 5, pp. 835–851, Sep. 2015, doi: 10.1016/j.jpolmod.2015.05.001.
- [6] C. Delavallade, "Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries," *J. Econ. Financ.*, vol. 30, no. 2, pp. 222–239, 2006, doi: 10.1007/BF02761488.
- [7] S. Habib, S. Abdelmonen, and M. Khaled, "The Effect of Corruption on the Environmental Quality in African Countries: a Panel Quantile Regression Analysis," *J. Knowl. Econ.*, vol. 11, no. 2, pp. 788–804, 2020, doi: 10.1007/s13132-018-0571-8.
- [8] A. Alfada, "The Destructive Effect of Corruption on Economic Growth in Indonesia: A Threshold Model," *Heliyon*, vol. 5, no. 10, p. e02649, Oct. 2019, doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02649.
- [9] E. E. Ezebilo, F. Odhuno, and P. Kavan, "The Perceived Impact of Public Sector Corruption on Economic Performance of Micro, Small, and Medium Enterprises in a Developing Country," *Economies*, vol. 7, no. 3, p. 89, Aug. 2019, doi: 10.3390/economies7030089.
- [10] M. K. Justesen and C. Bjørnskov, "Exploiting the Poor: Bureaucratic Corruption and Poverty in Africa," *World Dev.*, vol. 58, pp. 106–115, Jun. 2014, doi: 10.1016/j.worlddev.2014.01.002.
- [11] M. Mogalakwe and F. Nyamnjoh, "Botswana at 50: Democratic Deficit, Elite Corruption and Poverty in The Midst of Plenty," *J. Contemp. African Stud.*, vol. 35, no. 1, pp. 1–14, 2017, doi: 10.1080/02589001.2017.1286636.
- [12] Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 dan Kemunduran Demokrasi*. Transparency International Indonesia, 2021.
- [13] A. W. Asmorojati, "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *The 6th University Research Colloquium 2017*, 2017, pp. 491–497.
- [14] J. Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development)," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 16, no. 1, p. 77, 2016, doi: 10.30641/dejure.2016.v16.77-93.
- [15] E. Enadarlita and N. Asvio, "Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi terhadap Efektivitas Organisasi Di Provinsi Jambi," *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, vol. 4, no. 1, p. 34, Feb. 2019, doi: 10.31851/jmksp.v4i1.2473.
- [16] D. W. N. Ningrum, "Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Pelayanan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang," *PERSPEKTIF*, vol. 9, no. 1, pp. 46–54, 2020, doi: 10.31289/perspektif.v9i1.2835.